

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PERHUBUNGAN

JL. RAYA JAKARTA KM. 50 CIMANDALA KEC. SUKARAJA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan dapat diselesaikan.

Pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi merupakan bagian integral dari pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Sedangkan Perencanaan strategis merupakan jalan keluar guna pembangunan daerah secara terpadu di sektor lalu lintas dan angkutan jalan karena pada perencanaan strategis ini dapat dilihat dan membandingkan visi yang telah ditetapkan dengan misi yang dipikirkan secara matang dengan melalui alternatif-alternatif strategi pembangunan yang dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan dan bagaimana cara mencapai tujuan yang realistis dan terpadu agar tujuan utama yang berupa visi dapat tercapai.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Bogor secara signifikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR



ADE YANA MULYANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196307041993121001

DAFTAR ISI

Halaman:

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 13
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I - 18
1.4 Sistematika Penulisan.....	I - 21
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan (Perangkat Daerah).....	II - 22
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	II - 25
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINS PERHUBUNGAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III - 3
3.3 Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan	III - 5
3.4 Dukungan Terhadap Pencapaian Target Pacakarsa	III - 30
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V : PENUTUP	

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021 memiliki dinamika tersendiri. Adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan warna baru dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2021 yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan kegiatan yang diampu, serta adanya penambahan sub-sub kegiatan yang mengiringi kegiatan. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang menyinergikan seluruh program sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se- Indonesia, mulai tahun 2021.

Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut, Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari urusan wajib non pelayanan dasar yang telah ditetapkan. Renja ini disusun dengan

tetap mempedomani Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2021.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2021
Dinas perhubungan

Uraian	Jumlah program	Jumlah kegiatan	Jumlah sub kegiatan	Anggaran (rp)	Pengampu
Program pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	1	4	36	41.909.942.000	Sekretariat
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1	4	7	67.936.480.000	Bidang Lalu Lintas
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1	2	5	3.990.000.000	Bidang Keselamatan
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1	1	1	11.407.000.000	Bidang Pengawasan
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1	7	11	2.191.550.000	Bidang Angkutan

Uraian	Jumlah program	Jumlah kegiatan	Jumlah sub kegiatan	Anggaran (rp)	Pengampu
Upt	1	1	5	7.287.775.000	UPT I, II, III, IV, V
Jumlah	8	19	65	134.722.747.000	

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2021 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja SKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang kemudian menjadi rancangan akhir Renja maupun final Renja.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2021
Dinas perhubungan

Uraian	Jumlah program	Jumlah kegiatan	Jumlah sub kegiatan	Anggaran (rp)	Keterangan
Program pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	1	4	36	41.909.942.000	Sekretariat
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1	4	7	69.536.480.000	Bidang Lalu Lintas
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1	2	5	3.990.000.000	Bidang Keselamatan
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1	1	1	11.407.000.000	Bidang Pengawasan
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1	7	11	2.191.550.000	Bidang Angkutan
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1	1	5	7.287.775.000	UPT I, II, III, IV, V
Jumlah	8	19	65	136.322.747.000	

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam Bidang Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor 2018-2023 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban”. Perencanaan tahun 2021 di lingkup Perangkat Daerah (PD) memegang peranan yang cukup penting. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan perhubungan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023.

Program/Kegiatan Panca Karsa yang di canangkan Bupati Bogor 2019-2023 dimana Dinas Perhubungan Kabupaten masuk kedalam Panca Karsa yaitu Bogor Membangun dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021 yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran pembangunan menurunnya tingkat kemacetan, yang disesuaikan dengan Renstra/RPJMD sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keterkaitan Renja terhadap RKPD Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OUTCOME	VOLUME DAN SATUAN
Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Meningkatnya Presentase Layanan Angkutan Darat	70%
Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Program pengelolaan perkeretaapian	Terlaksananya rekomendasi kelayakan jalur kereta api	3 Jalur
Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	100%

2. pencapaian target sasaran daerah (IKU) untuk tahun 2021

Program Berdasarkan Renstra :

Tabel 1.2

Pencapaian Target Sasaran Daerah (IKU) Tahun 2021

PROGRAM	OUTCOME	TUJUAN PD	INDIKATOR, VOLUME DAN SATUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR, VOLUME DAN SATUAN
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Meningkatnya pelayanan angkutan darat	Sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi / Terwujudnya pembangunan dan pengembangan transportasi yang selamat, tertib, lancar	Pelayanan Angkutan Darat 70%	Menurunnya tingkat kemacetan	Cangkupan pelayanan angkutan umum 80%
Program pengelolaan perkeretaapian	Rekomendasi kelayakan jalur kereta api	Sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi / Terwujudnya pembangunan dan pengembangan transportasi yang selamat, tertib, lancar	Jaringan Angkutan Berbasis Rel 3 jalur	Menurunnya tingkat kemacetan	Cangkupan pelayanan angkutan umum 80
Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi/ Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Pegawai 100%	Kualitas pelayanan publik meningkat	Cangkupan pelayanan angkutan umum 80

Penyusunan Renja Tahun 2021 mengacu dan mempedomani Renstra 2018 – 2023 sehingga sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memadukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, Undang-undang 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Perpres 55 Tahun 2018 tentang RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) tahun 2018 – 2029, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah melakukan kesepakatan Bersama untuk pengembangan dan pembangunan antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek tentang RITJ, dengan indikator kinerja utama :

- 1) Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum harus mencapai 60% dari total pergerakan orang pada tahun 2030;
- 2) Waktu perjalanan orang rata – rata di dalam kendaraan angkutan umum adalah 1,5 jam pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan di wilayah Kabupaten Bogor;
- 3) Kecepatan rata - rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 km/jam pada tahun 2030;
- 4) Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah perkotaan mencapai 80% dari Panjang jalan pada tahun 2030;
- 5) Akses ke angkutan umum dengan berjalan kaki harus dapat dijangkau dalam jarak maksimal 3.000 m;

- 6) Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal / jaringan cabang (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk), melalui satu simpul transportasi;
- 7) Simpul transportasi harus memiliki fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir (park and ride), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500m

Secara umum, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2021 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Mengacu pada UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

- terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sasaran dan prioritas pembangunan Nasional di sektor perhubungan yaitu dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan mengembangkan aksesibilitas transportasi di Kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda dan mendukung Kawasan yang lebih maju dan membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubungan dengan Kawasan prioritas dan system jadingan utama logistic,, serta mengembangkan angkutan masal perkotaaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.

Selain mengacu pada Renstra 2013-2018 Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mengacu pada Renja K/L Vertikal dan Provinsi Jawa Barat dalam hal pencapaian target Nasional yang menjadi kewenangan Daerah, dengan keterkaitan sebagai berikut :

Tabel 1.3

Keterkaitan Renja terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME	VOLUME DAN SATUAN	ANGGARAN (Rp)
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Meningkatnya pelayanan Angkutan Darat	70%	92,562,805,000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program pengelolaan perkeretaapian	Tersedianya rekomendasi kelayakan jalur kereta api	3 Jalur	250,000,000
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	100%	41,909,942,000

b. Keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat

Tabel 1.4

Keterkaitan Renja terhadap Prioritas Pembangunan Jawa Barat

PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME	VOLUME DAN SATUAN	ANGGARAN (Rp)
Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	meningkatnya pelayanan Angkutan Darat	70%	92,562,805,000
Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Program pengelolaan perkeretaapian	Tersedianya rekomendasi kelayakan jalur kereta api	3 Jalur	250,000,000
Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	100%	41,909,942,000

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, hal tersebut tidak lepas dari salah satu indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut salah satunya adalah Kinerja Pelayanan dimana kinerja tersebut adalah salah satu indikator penilaian dari sebuah organisasi dalam satuan kerja. Dalam pencapaian kinerja pelayanan bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki maksud dan tujuan adalah peningkatan kinerja pelayanan serta menurunkan tingkat resiko atau menurunkan tingkat permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan transportasi atau pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Bogor, Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah, sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah dengan menurunkannya tingkat kemacetan dengan strategi meningkatkan pelayanan transportasi yang nyaman. Dengan strategi tersebut diharapkan tersedianya jaringan dan layanan angkutan umum perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dan menjangkau seluruh wilayah sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan mengatasi permasalahan kemacetan di wilayah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hal tersebut diatas target kinerja Perhubungan Kabupaten Bogor dan perubahan PMDN No.90 Tahun 2019 tidak melakukan perubahan target kinerja daerah (IKU dan IKK) dengan target kinerja yaitu Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Presentase Layanan Angkutan darat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi Tahun 2018 – 202;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah));
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2019;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor

Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036;
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk memadukan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selain hal tersebut hasil / keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan

dilaksanakan Dinas Perhubungan serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun Anggaran 2021.

Pengelolaan pembangunan daerah mengharuskan adanya penerapan manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi yang ditetapkan akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang melahirkan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Untuk mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, dengan misi mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, dan dengan tujuan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan,.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2021 yaitu Menurunnya tingkat kemacetan.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan arah kebijakan yaitu dengan penyelesaian titik kemacetan dan pengembangan angkutan massal sehingga dapat menciptakan transportasi yang terpadu, tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, ekonomis, dan terjangkau oleh masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra perangkat daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program Kegiatan.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang penjelasan rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 berdasarkan Renstra perangkat daerah untuk tahun 2021 dan Permendagri No. 90 tahun 2019

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan Renja maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2020, Dinas Perhubungan mengajukan usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan Perencanaan dan Pelaporan sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan;
Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan Perencanaan dan Pelaporan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan Pelaporan sehingga dengan adanya hasil/ keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Program Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebanyak 15 (Lima Belas) kegiatan;
Program ini bertujuan untuk melakukan Kajian kebutuhan fasilitas Perhubungan, pengadaan fasilitas lalu lintas dan manajemen rekayasa lalu lintas, serta peyusunan Rencana Induk Transportasi Jalan Perhubungan.
3. Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan sebanyak 11 (Sebelas) kegiatan;
Program ini bertujuan untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan berjangka dan berkelanjutan yang efektif dan efisien menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Program Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas sebanyak 11 (Sebelas) kegiatan;
Program ini bertujuan untuk melakukan pengawaasan terhadap pelanggaran sarana dan prasarana LLAJ, pengendalian operasional

di jalan dan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas .

5. Program Peningkatan Keselamatan LLAJ sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan;

Program ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi keselamatan dan ketertiban LLAJ serta melakukan uji kelayakan sarana transportasi.

6. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan sebanyak 12 (Dua Belas) kegiatan;

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pelayanan, monitoring dan evaluasi perizinan angkutan serta pengelolaan terminal angkutan darat.

Untuk evaluasi Tahun 2020, program yang tidak memenuhi target adalah Program Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas hal ini disebabkan karena pada Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dari rencana anggaran, dikarenakan tidak terserapnya anggaran honor Non PNS lembur, dikarenakan tidak ada aturan yang mengikat tentang pengaturan uang lembur di luar jam kerja dan beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan terkendala factor teknis dan non teknis.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung Program Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan kegiatan di tahun 2021, akan dilakukan usulan penambahan honor lembur diluar jam kerja khususnya pada hari libur nasional.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor dalam proses pengadaan terkait proses penyedia barang dan jasa menghindari kesalahan yang menghambat proses pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan dinas instansi terkait baik tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat berkaitan dengan perizinan dalam menunjang pembangunan prasarana Perhubungan yang terintegrasi;

- 3) Meningkatkan kerjasama antar wilayah khususnya Jabodetabek dalam pelayanan angkutan umum;

Pelaksanaan Renja SKPD, Hasil Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 Serta Target Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6)*100
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
	Bidang Urusan Perhubungan						
	PROGRAM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	50.788.891.000	49.019.854.858	(297)	734.177.000	488.772.000	(47)
	Penyusunan rencana induk Transportasi Jalan	500.000.000	401.833.600	-19,63328	-	-	-
	Survei Lalu Lintas Harian	89.520.000	79.900.000	-10,746202	-	-	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6*100
	Survei kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	-	-	-	-	-	-
	Kajian Manajemen dan Rekayasa lalu lintas pada simpang	45.000.000	-	-100	-	-	-
	Survei Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)	16.153.000	12.590.000	-22,057822	-	-	-
	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)	808.200.000	404.687.000	-49,927369	518.917.000	273.512.000	-47,291763
	Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.150.000.000	4.124.672.350	-0,6103048	-	-	-
	Penyusunan Feasibility Study (Studi Kelayakan) Pembangunan Lokasi Parkir Park and Ride	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Detail engineering Desain (DED) Pembangunan Lokasi Parkir Park and Ride	-	-	-	-	-	-

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1				2	3	4	5 = $\frac{4-3}{3} \times 100$	6	7	8 = $\frac{7-6}{6} \times 100$
				Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	653.000.000	584.641.692	-10,468347	12.995.000	12.995.000	-
				Pengadaan Lampu Lalu Lintas	526.000.000	406.246.300	-22,766863	14.480.000	14.480.000	-
				Pengadaan Pagar Pengaman (guardrail)	500.000.000	447.955.000	-10,409	16.230.000	16.230.000	-
				Pengadaan Marka jalan	700.000.000	629.088.500	-10,130214	14.895.000	14.895.000	-
				Pembangunan Alat Penerangan Jalan	2.411.183.000	2.278.312.500	-5,5105938	14.560.000	14.560.000	-
				Pengadaan Patok Pengaman (deliniator)	219.365.000	218.180.000	-0,5401956	7.780.000	7.780.000	-
				Pengadaan Cermin Lalu Lintas	113.400.000	110.770.000	-2,319224	134.320.000	134.320.000	-
				Pengadaan Road Barrier	250.000.000	221.453.000	-11,4188	-	-	-
				Pengadaan Paku Jalan	44.070.000	41.270.000	-6,3535285	-	-	-
				Pengadaan Rambu Penamaan Jalan	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Fasilitas Zona Selamat Sekolah	535.000.000	466.516.338	-12,800684	-	-	-
				Pembayaran Rekening Listrik Alat Penerangan Jalan dan Alat Pengendali Lalu Lintas	39.228.000.000	38.591.738.578	-1,6219573	-	-	-

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1				2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6*100
				PROGRAM PENGELOLAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN	11.503.968.000	11.130.646.518	(37)	7.874.862.308	3.592.866.987	(522)
				Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah I	1.400.000.000	1.380.486.350	-1,3938321	1.455.520.000	624.893.800	-57,067316
				Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah II	1.250.000.000	1.198.739.700	-4,100824	880.720.000	340.201.500	-61,372343
				Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah III	1.000.000.000	962.592.500	-3,74075	1.163.205.000	476.747.500	-59,014318
				Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah IV	1.049.775.000	974.917.250	-7,1308376	839.265.000	309.662.500	-63,103132
				Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah V	1.000.000.000	985.582.250	-1,441775	730.000.000	280.857.750	-61,526336
				Pengelolaan UPT Wilayah I	591.712.000	578.058.040	-2,3075347	575.972.000	321.896.750	-44,112431
				Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah II	457.012.000	424.425.510	-7,1303357	525.266.000	328.614.345	-37,438489
				Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah III	454.175.000	443.450.969	-2,3612112	520.766.308	332.336.692	-36,183143
				Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah IV	468.615.000	448.595.650	-4,272025	601.176.000	319.113.350	-46,918481

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6*100
	Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah V	449.349.000	436.577.199	-2,8422898	582.972.000	258.542.800	-55,650906
	Pengaasan Retribusi UPT Wilayah I	-	-	-	-	-	-
	Pengaasan Retribusi UPT Perhubungan Wilayah II	-	-	-	-	-	-
	Pengaasan Retribusi UPT Perhubungan Wilayah III	-	-	-	-	-	-
	Pengaasan Retribusi UPT Perhubungan Wilayah IV	-	-	-	-	-	-
	Pengaasan Retribusi UPT Perhubungan Wilayah V	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN LLAJ	1.891.665.000	1.835.669.800	(19)	3.601.956.000	760.889.500	(420)
	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	633.875.000	615.851.300	-2,8434155	488.416.000	292.684.000	-40,074854
	pengadaan peralatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	50.000.000	49.100.000	-1,8	1.463.125.000	-	-100
	pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	107.790.000	105.675.000	-1,9621486	146.325.000	-	-100
	pengadaan bukti tanda lulus uji	700.000.000	690.925.000	-1,2964286	875.000.000	-	-100

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1				2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6*100
				Feasibility Study (Studi Kelayakan) Pembangunan Gedung Uji di Wilayah Barat dan Timur Kabupaten Bogor	-	-	-	-	-	-
				penyusunan DED Pembangunan Gedung Uji di Wilayah Barat dan Timur Kabupaten Bogor	-	-	-	-	-	-
				Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk operator angkutan	-	-	-	-	-	-
				Sosialisasi Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	150.000.000	148.792.500	-0,805	-	-	-
				Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk usia dini	-	-	-	-	-	-
				Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk pelajar	-	-	-	185.960.000	47.441.500	-74,488331
				Pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	250.000.000	225.326.000	-9,8696	-	-	-
				Aksi Keselamatan LLAJ	-	-	-	-	-	-
				pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik awak kendaraan angkutan umum teladan	-	-	-	443.130.000	420.764.000	-5,0472773

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6)*100
	Feasibility Study (Studi Kelayakan) Pembangunan taman edukatif keselamatan transportasi	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Detail Engeneering Desain (DED) Pembangunan taman edukatif keselamatan transportasi	-	-	-	-	-	-
	Pembebasan lahan gedung uji wilayah barat dan timur	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS	10.152.523.476	9.045.277.000	(203)	12.266.864.000	5.670.153.500	(826)
	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	576.000.076	387.739.000	-32,68421	335.890.000	-	-100
	Pengawasan Lalu Lintas Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	333.280.000	327.798.992	-1,6445655	500.000.000	267.992.500	-46,4015
	Penanggulangan Demo Angkutan Umum	23.830.000	-	-100	32.000.000	-	-100
	Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	86.717.000	37.434.000	-56,831994	115.000.000	-	-100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6*100
	Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Bogor	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Car Free Day dan Car Free Night	-	-	-	158.000.000	9.600.000	-93,924051
	Pelaksanaan Ramp Check	-	-	-	115.400.000	-	-100
	Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggar Angkutan Orang dan Barang	-	-	-	200.700.000	37.500.000	-81,315396
	Pengawasan dan Pengendalian Sarana Fasilitas Lalu Lintas	7.302.467.400	6.540.384.608	-10,435963	10.187.090.000	5.198.309.000	-48,9716
	Pengawasan dan Pengendalian Prasarana fasilitas Lalu Lintas	251.200.000	247.175.000	-1,6023089	349.164.000	156.752.000	-55,106483
	Survei Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan	-	-	-	273.620.000	-	-100
	Survei Kinerja Lalu Lintas Angkutan Lebaran	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1.256.206.000	1.196.860.100	(29)	1.588.831.000	133.593.000	(807)
	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Angkutan Umum di wilayah Kabupaten Bogor	-	-	-	-	-	-
	Kajian Kelembagaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	-	-	-	107.550.000	-	-100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = $\frac{(4-3)}{3} \times 100$	6	7	8 = $\frac{(7-6)}{6} \times 100$
	Penyusunan Detail engineering Desain (DED) Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Perijinan Angkutan Umum	203.608.000	196.390.300	-3,5449	200.864.000	115.083.000	-42,70601
	Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan umum	119.215.000	111.495.000	-6,4756952	43.557.000	9.490.000	-78,212457
	Kajian Sarana Angkutan Massal (SAUM) Wisata Puncak	-	-	-	211.550.000	-	-100
	Pengadaan Shuttle Bus	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Shuttle Bus, Bis Sekolah, Bis Difabel	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Halte SAUM	-	-	-	110.820.000	-	-100
	Penyusunan Detail Engineering Desain Terminal	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Feasibility Study (Studi Kelayakan) terminal tipe C dan Sub Terminal	-	-	-	144.605.000	1.030.000	-99,287715

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6*100
	Pembangunan terminal tipe C dan/ Sub Terminal/Pangkalan	-	-	-	15.975.000	2.000.000	-87,480438
	Pengadaan lahan untuk Pembangunan Perluasan Terminal / Sub Terminal /Pangkalan	-	-	-	640.810.000	5.990.000	-99,065246
	Rehabilitasi Terminal	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Halte Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Detail engineering Desain Fasilitas Angkutan Umum	-	-	-	113.100.000	-	-100
	Penyusunan DED Park and Ride Bojonggede	110.000.000	105.020.000	-4,5272727	-	-	-
	Penyusunan Perencanaan Teknis Gedung Park and Ride	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan terminal angkutan darat	179.445.000	171.320.000	-4,5278498	-	-	-
	Rehabilitasi Terminal	300.000.000	287.086.800	-4,3044	-	-	-
	Rerouting Angkutan Umum (Angkot)	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Renca Teknis Pangkalan/terminal	-	-	-	-	-	-
	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	343.938.000	325.548.000	-5,3468939	-	-	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6)*100
	Program Pelayanan Administrasi Umum, kepegawaian, keuanganm Perencanaan dan Pelaporang Perangkat Daerah	7.796.567.524	7.237.546.597	-312,34	49.662.134.500	29.940.822.642	-1727,88
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	550.000.000	469.124.209	-14,704689	554.000.000	303.457.550	-45,224269
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	48.000.000	48.000.000	-	40.000.000	23.100.000	-42,25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.565.000	-1,74	25.000.000	4.700.000	-81,2
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	241.045.000	226.265.200	-6,1315522	96.020.000	60.700.000	-36,784003
	Pembangunan Gedung Utama Kantor	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	454.165.000	369.578.300	-18,624663	395.394.000	213.368.000	-46,036612
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	66.599.500	60.604.500	-9,0015691	35.375.000	21.650.000	-38,798587
	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	46.040.000	32.970.000	-28,388358	110.626.000	86.695.000	-21,632347
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	23.860.000	22.545.000	-5,511316	23.460.000	9.500.000	-59,505541

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6*100
	Penyusunan Perencanaan Anggaran	65.780.000	53.925.000	-18,022195	70.625.000	27.410.000	-61,189381
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	93.568.000	89.843.000	-3,9810619	78.624.000	45.108.000	-42,628205
	Penyusunan Pelaporan Keuangan	36.370.000	34.799.000	-4,3194941	18.800.000	5.695.000	-69,707447
	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	355.320.000	353.703.300	-0,4549983	223.298.000	114.956.000	-48,519019
	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	130.000.000	106.900.000	-17,769231	52.800.000	21.000.000	-60,227273
	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	223.100.000	214.630.000	-3,7965038	358.408.000	244.848.000	-31,684561
	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	50.000.000	-	-100	60.000.000	20.000.000	-66,666667
	Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	68.684.000	66.302.000	-3,4680566	54.912.000	31.504.000	-42,628205
	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	66.684.000	64.384.000	-3,4491032	54.912.000	31.504.000	-42,628205
	Pengelolaan Keamanan Kantor	390.100.000	370.800.000	-4,9474494	374.400.000	214.800.000	-42,628205
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Kebersihan Kantor	682.886.000	615.906.500	-9,8082989	2.199.748.000	1.513.918.950	-31,177619
	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	107.050.000	68.612.400	-35,906212	100.000.000	19.630.100	-80,3699

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6*100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	356.000.000	341.522.250	-4,0667837	277.576.500	-	-100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	-	-	-	200.000.000	189.911.500	-5,04425
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor	-	-	-	103.125.000	-	-100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	249.700.000	246.178.750	-1,4101922	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	-	-	-	100.000.000	-	-100
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	700.000.000	613.681.708	-12,331185	641.123.000	114.119.010	-82,200138
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	159.425.000	155.621.650	-2,3856672	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	150.000.000	-	-100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	-	-	-	200.000.000	-	-100

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	2019			2020		
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
			1	2	3	4	5 = ((4-3)/3)*100	6	7	8 = (7-6)/6*100
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	144.410.000	141.623.000	-1,9299218	200.000.000	99.022.000	-50,489
				Pembayaran Rekening Listrik PJU	-	-	-	42.443.908.000	26.359.421.532	-37,895866
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	551.416.024	550.356.830	-0,1920862	420.000.000	164.804.000	-60,760952
				Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	101.425.000	100.128.000	-1,2787774	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.581.190.000	1.572.542.000	-0,5469298	-	-	-
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	63.450.000	61.750.000	-2,679275	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	165.300.000	160.685.000	-2,7918935	-	-	-

Pada Tabel 2.1 kondisi kinerja SKPD Tahun 2020 rata-rata pencapaiannya adalah di atas 92.45 %, dengan berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai visi dan misinya. Untuk evaluasi Tahun 2020, Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2020 diuraikan menurut kegiatan dengan mengukur capaian indikator outputnya rata-rata 90.70%, adapun realisasi keseluruhan anggaran belanja langsung sebesar Rp103.016.729.163,- atau 92.45 % dari total rencana anggaran sebesar Rp111.429.530.869,- uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Admintrasi Umum, kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan pelaporan, terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1.1. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, dari rencana anggaran Rp.554.000.000,- terealisasi sebesar Rp 456.971.320,- atau 82%, dengan output dari rencana jumlah penyediaan jaringan jasa kebutuhan selama 1 tahun: 17 jaringan listrik, 7 jaringan telepon, 1 jaringan internet, dan 5 mobile internet selama 1 tahun, terealisasi 100%;

- 1.2. Kegiatan Pengelolaan Legalitas kendaraan dinas/operasional/jabatan, dari rencana anggaran Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp 67.467.100,- atau 67%, dengan output dari rencana perpanjangan 2 STNK roda 6, 22 STNK roda 4 dan 49 STNK roda 2 kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun, terealisasi 100%;

- 1.3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana anggaran Rp. 2.199.784.000,- terealisasi sebesar Rp 1.749.393.950,- atau 80%, dengan output dari rencana 28 petugas kebersihan dan 25 alat kebersihan selama 1 tahun, terealisasi 100%;

- 1.4. Kegiatan Penyediaan bahan logistik Kantor, dari rencana anggaran Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp 17.600.000,- atau 70%.
- 1.5. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran Rp.96.020.000,- terealisasi sebesar Rp 95.300.000,- atau 99%.
- 1.6. Kegiatan Pengelolaan asset perangkat daerah, dari rencana anggaran Rp. 60.736.000,- terealisasi sebesar Rp 54.704.000,- atau 90%.
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran Rp.40.000.000,- terealisasi sebesar Rp 40.000.000,- atau 100%, dengan output dari rencana penyediaan 20 eksemplar koran dan 20 eksemplar majalah per bulan Kebutuhan bahan selama 1 tahun, terealisasi 100%;
- 1.8. Kegiatan Pengelolaan Dokumen dan arsip, dari rencana anggaran Rp.61.812.000,- terealisasi sebesar Rp 57.904.000,- atau 94%.
- 1.9. Kegiatan Pengelolaan Keamanan Kantor, dari rencana anggaran Rp. 374.400.000,- terealisasi sebesar Rp 364.800.000,- atau 97%.
- 1.10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, dari rencana anggaran Rp. 396.453.000,- terealisasi sebesar Rp 318.259.000,- atau 80%, dengan output dari rencana penyediaan kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah sebanyak 1890 dalam daerah dan 131 luar daerah selama 1 tahun, terealisasi 100%;
- 1.11. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran Rp. 395.394.000,- terealisasi sebesar Rp 340.368.000,- atau 86%.

- 1.12. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor didrop karena ada refocusing.
- 1.13. Kegiatan Pengelolaan Admintrasi Kepegawaian, dari rencana anggaran Rp. 78.624.000,- terealisasi sebesar Rp 76.608.000,- atau 97% dengan output dari rencana Pengelolaan dan Administrasi data Kepegawaian 315 pegawai selama 1 tahun, terealisasi 100%;
- 1.14. Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor, dari rencana anggaran Rp. 265.342.000,- terealisasi sebesar Rp 263.213.200,- atau 99%.
- 1.15. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung utama kantor, dari rencana anggaran Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp 191.086.500,- atau 95%.
- 1.16. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung penunjang kantor, dari rencana anggaran Rp. 102.575.000,- terealisasi sebesar Rp 99.484.300,- atau 97%.
- 1.17. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung penunjang kantor, dari rencana anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp 99.554.400,- atau 99%.
- 1.18. Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional/jabatan, dari rencana anggaran Rp. 641.123.000,- terealisasi sebesar Rp 638.869.327,- atau 99%.
- 1.19. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dari rencana anggaran Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp 132.087.500,- atau 88%.
- 1.20. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, dari rencana anggaran Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp 181.231.000,- atau 91%.
- 1.21. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringangan listrik , dari rencana anggaran Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp 146.815.000,- atau 98%.

- 1.22. Kegiatan pembayaran rekening PJU, dari rencana anggaran Rp. 40.543.908.000,- terealisasi sebesar Rp 39.096.902.805,- atau 97%.
 - 1.23. Kegiatan pembinaan jasmani dan rohani, dari rencana anggaran Rp. 52.800.000,- terealisasi sebesar Rp 44.100.000,- atau 84%.
 - 1.24. Kegiatan pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur, dari rencana anggaran Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp 20.000.000,- atau 33%.
 - 1.25. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan, dari rencana anggaran Rp. 18.800.000,- terealisasi sebesar Rp 12.641.000,- atau 67%.
 - 1.26. Kegiatan penatausahaan keuangan, dari rencana anggaran Rp. 223.298.000,- terealisasi sebesar Rp 221.442.000,- atau 99%.
 - 1.27. Kegiatan penyusunan Lakip, dari rencana anggaran Rp. 23.460.000,- terealisasi sebesar Rp 23.280.000,- atau 99%.
 - 1.28. Kegiatan penyusunan perencanaan anggaran, dari rencana anggaran Rp. 70.625.000,- terealisasi sebesar Rp 68.092.000,- atau 96%.
 - 1.29. Kegiatan penyusunan perencanaan perangkat daerah, dari rencana anggaran Rp. 110.626.000,- terealisasi sebesar Rp 105.471.000,- atau 95%.
 - 1.30. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dari rencana anggaran Rp. 35.375.000,- terealisasi sebesar Rp 35.160.000,- atau 99%.
 - 1.31. Kegiatan publikasi kinerja, dari rencana anggaran Rp. 360.280.000,- terealisasi sebesar Rp 337.609.000,- atau 94%.
- 2) Program Manajemen rekayasa lalu lintas, terdiri dari 15 (Lima Belas), dari rencana anggaran Rp. 3.634.417.000 terealisasi sebesar Rp 680.772.000 atau sekitar 19%, rendahnya realisaasi karena ada hibah dari pusat yang tidak bisa dilaksanakan,

- 3) Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan, terdiri dari 11 (Sebelas), dari rencana anggaran Rp. 7.934.277.358 terealisasi sebesar Rp 7.519.341.302 atau sekitar 95%.
- 4) Program Peningkatan Keselamatan LLAJ, terdiri dari 9 (Sembilan), dari rencana anggaran Rp. 3.699.956.000 terealisasi sebesar Rp 3.586.549.500 atau sekitar 97%.
- 5) Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas Sarana dan Prasarana LLAJ, terdiri dari 11 (Sebelas), dari rencana anggaran Rp. 12.471.144.000 terealisasi sebesar Rp 11.537.219.920 atau sekitar 93%.
- 6) Program Pengembang Sarana dan Prasarana Perhubungan, terdiri dari 12 (Dua Belas), dari rencana anggaran Rp. 1.686.831.000 terealisasi sebesar Rp 1.159.872.500 atau sekitar 69%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan (Perangkat Daerah)

Untuk mendukung strategi dana arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, dengan misi mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, dan dengan tujuan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan,

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan, yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2021 yaitu Menurunnya tingkat kemacetan.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas terdapat Indikator kinerja perangkat daerah, sebagai berikut :

- a. Presentase Layanan angkutan darat dengan target V/C ratio sebesar 0,8, dan realisasi capaian sebesar 0,82 dengan tingkat capaian sebesar 97,5 %.

- b. Presentase layanan angkutan darat dengan target presentase sebesar 50 % dan realisasi capaian sebesar 45 % dengan tingkat capaian sebesar 81,82 %.
- c. Rata-rata tingkatan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebesar 89,66 %.
- d. Realisasi anggaran Belanja langsung sebesar 91 %.

Pencapaian kinerja pelayanan dengan mengacu pada SPM/standar nasional dan target IKK pada Dinas Perhubungan ada beberapa indikator yang terkait yaitu:

- a. Jumlah arus penumpang angkutan umum;
- b. Rasio ijin trayek;
- c. Jumlah uji kir angkutan umum;
- d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis;
- e. Presentase layanan Angkutan darat;
- f. Presentase Kepemilikan kir angkutan umum;
- g. Pemasangan rambu-rambu;
- h. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan;
- i. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum;
- j. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2019

URUSAN : Wajib Non Pelayanan Dasar
 BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2019	2020		
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7 = ((6-5)/5)*100
1	TINGKAT KINERJA PELAYANAN LALU LINTAS (V/C RATIO)	V/C RATIO	0.82	0.8	0.82	-2.44
2	PERSENTASE LAYANAN ANGKUTAN	%	58	65	65	0

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Perhubungan serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini dapat dilihat dari prosentase target yang dicanangkan dalam Renstra dimana untuk pelayanan transportasi prosentasenya melebihi target yang dicantumkan dalam Renstra. Dengan demikian tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan sejauh ini sudah cukup bagus sesuai dengan visi misi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, hal tersebut tidak lepas dari salah satu indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut salah satunya adalah Kinerja Pelayanan dimana kinerja tersebut adalah salah satu indikator penilaian dari sebuah organisasi dalam satuan kerja.

Realisasi capaian periode 2014-2018 pada umumnya sesuai dengan target dan akhir periode telah sesuai dengan target IKK Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian kinerja pelayanan bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki maksud dan tujuan adalah peningkatan kinerja pelayanan serta menurunkan tingkat resiko atau

menurunkan tingkat permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan transportasi atau pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun permasalahan pelayanan angkutan perdesaan di wilayah Kabupaten Bogor masih belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan jumlah trayek angkutan perdesaan sebanyak 109 trayek dengan realisasi sebanyak 76 target dengan target kendaraan sebanyak 11.031 kendaraan dengan jumlah realisasi 7.178 dan kendaraan yang beroperasi sebanyak 5.202 kendaraan dengan rincian 3.647 yang berijin dan 1.555 kendaraan tidak berijin atau tidak memperpanjang perijinan.

Berdasarkan data yang ada rata-rata kualitas pelayanan jalan di wilayah Kabupaten Bogor masih berada dalam tingkat pelayanan D (mulai tidak mendekati stabil) dengan volume lalu lintas tinggi dengan rata-rata V/C ratio sebesar 0.82 pada tahun 2019 dengan target peningkatan pelayanan jalan dengan rata-rata V/C ratio sebesar 0.8 pada tahun 2019 dan target peningkatan pelayanan C (stabil) pada tahun 2023 atau dengan rata-rata V/C ratio 0.45 s.d 0.74. berdasarkan target tersebut diatas tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan sebesar 97,5%.

Permasalahan tersebut diakibatkan karena sulitnya pembiayaan untuk kepemilikan angkutan dan adanya angkutan sewa khusus atau online dan belum terpernuhinya prasarana angkutan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan memiliki harapan, dengan berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah di susun berharap bahwa pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan optimal, sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sampai saat ini masih memiliki permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

- Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum;
- Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan,
- Masih rendahnya disiplin pengguna jalan,
- Belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan;
- Belum optimalnya pelaksanaan Andalalin;
- Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas;
- Masih rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi;
- Masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah;
- Masih kurangnya kualitas SDM Teknis Perhubungan seperti : Jurusan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor, dll.
- Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- Bmasih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat serta belum tersedianya database yang akurat dan lengkap;
- Belum terlaksananya pengalihan rute trayek baru angkutan kota yang berhimpitan (rerouting angkutan umum)
- Belum terlayannya seluruh kawasan Kabupaten Bogor
- Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
- Belum terlaksananya system angkutan umum massal
- Masih adanya terminal bayangan

- Masih adanya lokasi rawan kemacetan
- Masih leluasa beroperasinya angkutan penumpang umum ilegal
- Masih adanya pelanggaran perizinan dan tata tertib berlalu lintas angkutan perkotaan
- Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi;
- Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll
- alat uji keliling/portabel kurang lengkap sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan penyidikan kelaikan kendaraan dan pelanggaran lalu lintas lainnya
- Masih minimnya fasilitas dan perlengkapan jalan, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll
- Terkendalanya perawatan fungsi APILL dikarenakan kesulitan dalam perbaikan tiang lurus dan lengkung Traffic Light yang memerlukan mobil Crane dalam perbaikannya
- Belum adanya pengendalian terhadap bengkel umum kendaraan bermotor
- Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
- Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji (single), dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan/balai uji (double)
- Belum adanya pembaharuan sistem informasi pengujian
- Kurang memadai dan tidak layak nya ruang tunggu dan ruang arsip pengujian
- Belum maksimalnya pendapatan daerah dari sektor perparkiran dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang turut campur dalam penyelenggaraan perparkiran

- Masih adanya wilayah parkir yang belum tergali
- Tidak maksimalnya evaluasi terhadap analisa potensi parkir dengan kondisi real pungutan yang dilakukan oleh juru parkir sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran penerimaan pendapatan
- Masih adanya juru parkir yang tidak disiplin, seperti : tidak menggunakan seragam dan atribut, tidak memberikan karcis parkir, identik masih mengejar setoran dan kurang peduli terhadap kerapian parkir kendaraan, dll
- Masih terdapatnya kerusakan jalan disekitar kawasan terminal, pada lahan parkir, kerusakan pondasi jalur kedatangan/keberangkatan dan gedung terminal
- Masih belum maksimalnya PAD dari sektor terminal
- Semakin berkurangnya jumlah kendaraan umum yang keluar-masuk terminal dikarenakan hampir setiap PO memberangkatkan kendaraan dari poolnya.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan pada 5 Tahun yang akan datang yang meliputi aspek keselamatan dan keaman transportasi, aspek pelayanan, dan aspek kapasitas transportasi, adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan renstra Kementerian terdapat permasalahan sebagai berikut Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan, dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasisesuai dengan perkembangan teknologi, belum optimalnya pelayanan sarana dan prasanatransportasi, Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi, Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana prasarana transportasi, Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjangdalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi

- Berdasarkan renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terdapat permasalahan sebagai berikut : masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan, rendahnya disiplin pengguna jalan, belum memadainya ketersediaanfasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin, belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas, rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi, masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah, perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor, masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi, masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat masih belum berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transportasi, belum optimalnya pembangunan transportasi umum massal di Perkotaan;
- Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengembangkan dan mengatasi permasalahan transportasi di wilayah Jabodetabek sesuai dengan penetapan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
- Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengembangkan antarmoda/multimoda yang terintegasi didukung dengan konektivitas transportasi berbasis angkutan massal yang selamat dan aman sesuai dengan perkembangan teknologi;
- Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi pergerakan orang maupun barang yang menuju atau keluar Kabupaten Bogor, terkait dengan Daerah Wisata dan salah satu Daerah Penyanggah Kegiatan Ibu Kota Negara Indonesia (Jakarta);
- Melihat Pergerakan, Bangkitan dan Tarikan Perjalanan yang terdapat di Kabupaten Bogor, maka Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi atau menekan tingkat kemacetan yang terdapat

di Kabupaten Bogor Khususnya pada Kawasan Pariwisata serta Pusat pusat kegiatan yang terdapat di Kabupaten Bogor dengan menggunakan system pengaturan lalu lintas yang cerdas dan efisien serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat sejelas jelasnya, hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan serta pembangunan Sistem Kontrol Lalu Lintas berbasis *Intellegen Transport System* (ITS)

- Penyelesaian permasalahan transportasi yang sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan sendiri, hal ini harus diatasi oleh beberapa instansi terkait yang membidangi permasalahan Transportasi dengan membentuk suatu wadah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan meningkatkan peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;
- Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.
- Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan;
- Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan akibat rendahnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;

- Rendahnya mobilitas terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan akibat terbatasnya perkembangan kapasitas parasarana jalan dibandingkan perkembangan armada di jalan, system manajemen lalu lintas yang belum optimal, penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan terminal.
- Terbatasnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan;
- Belum memadainya peraturan dan kelembagaan bidang transportasi darat;
- Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi

Adapun isu – isu strategis yang akan ditangani Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada tahun 2019-2023 adalah :

- Pengembangan transportasi yang selamat tertib dan lancar;
- Peningkatan pelayanan transportasi angkutan umum yang terintergasi dan terjangkau;
- Ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan ;
- Optimalisasi pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan barang serta manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi;
- Pengembangan system angkutan umum massal berbasis jalan dan non jalan;
- Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi.

Bahwa untuk meningkatkan pengendalian transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan dari menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019 (covid-19) serta dengan tetap menekan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melakukan pengendalian kegiatan transportasi darat dengan melakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik, dengan memberlakukan sanksi administrative bagi pelanggar.

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan penanganan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melakukan beberapa perubahan kegiatan maupun anggaran dengan melakukan pengurangan anggaran pada pelaksanaan anggaran tahun 2020, dengan menambah anggaran kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan umum di beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Bogor.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan termasuk dalam bidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang handal, efektif serta efisien, merupakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Perhubungan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan khususnya di bidang Perhubungan dengan menekan terbangunya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, Undang-undang 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Perpres 55 Tahun 2018 tentang RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) tahun 2018 – 2029, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah melakukan kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se Jabodetabek tentang RITJ, yang dituangkan dalam 9 (Sembilan) pilar RITJ sebagai berikut :

1. Keselamatan dan keamanan transportasi;
2. Jaringan Prasarana transportasi perkotaan;
3. System transportasi berbasis jalan;
4. System transportasi berbasis rel;
5. System transportasi terintegrasi;
6. Kinerja lalu lintas;
7. System pendanaan transportasi perkotaan;
8. Keterpaduan transportasi dan tata ruang;
9. Transportasi ramah lingkungan.

RITJ merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah di Jabodetabek untuk penentuan penanganannya dan arah kebijakan di bidang transportasi di wilayah Jabodetabek untuk mendukung

Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi serta Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas pada keselamatan dan keamanan transportasi, konektivitas transportasi, dan pengembangan system angkutan umum massal perkotaan, Pelaksanaan RITJ dilaksanakan bertahap yaitu :

1. Tahap 1 tahun 2018-2019;
2. Tahap 2 tahun 2020-2024;
3. Tahap 3 tahun 2025-2029.

Setiap K/L dan Pemda sesuai kewenangannya harus menyusun Rencana aksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan RITJ melalui waktu, pendanaan dan mekanisme pelaksanaannya dan harus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Dan akan dilaksanakan evaluasi lebih dari 1 kali dalam 5 tahun.

Sementara arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi Jawa Barat, ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu syarat untuk mencapai arah kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perhubungan berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi terutama yang menyangkut pelayanan angkutan umum, hal ini sesuai dengan revisi RPJMD Provinsi Jawa Barat dimana dalam bidang Perhubungan terdapat indikator capaian program melalui peningkatan kondisi infrastruktur transportasi.

Berdasarkan arahan Presiden tentang 7 agenda pembangunan, salah satunya yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan kerangka pembangunan infrastruktur tahun 2020 – 2024 bidang perhubungan sebagai berikut :

1. Infrastruktur pelayanan dasar yaitu keselamatan dan keamanan transportasi;
2. Infrastruktur ekonomi yaitu dengan meningkatkan konektivitas angkutan darat dan kereta api;
3. Infrastruktur perkotaan yaitu dengan pembangunan angkutan massal umum perkotaan;

Indikasi kegiatan infrastruktur di provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 di wilayah Kabupaten Bogor adalah :

1. Pembangunan jalur ganda Jawa Barat;

2. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, pagar, penerangan jalan umum, ATCS);
3. Pengembangan SDM transportasi yang kompeten.

Bahwa untuk meningkatkan pengendalian transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan dari menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019 (covid-19) serta dengan tetap menekan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melakukan pengendalian kegiatan transportasi darat dengan melakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik, dengan memberlakukan sanksi administrative bagi pelanggar.

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan penanganan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melakukan beberapa perubahan kegiatan maupun anggaran dengan melakukan pengurangan anggaran pada pelaksanaan anggaran tahun 2020, dengan menambah anggaran kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan umum di beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Bogor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah belum maksimalnya cakupan pelayanan angkutan umum yang masih di bawah 80% serta belum optimalnya penanganan kemacetan di 7 (tujuh) lokasi kemacetan di Kabupaten Bogor yaitu di Cibinong, Cileungsi, Ciawi, Parung, Leuwiliang, Citeureup, dan Laladon.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2018-2023 terkait strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor yang telah disesuaikan dengan dengan program strategis prioritas PANCAKARSA, menghasilkan tujuan dengan target terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan, dan untuk mendukung tujuan tersebut sasaran RPJMD yang ditetapkan di bidang Perhubungan adalah dengan

menurunkan tingkat kemacetan, dengan strategi peningkatan pelayanan transportasi yang nyaman yang didukung dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan transportasi yang nyaman dan pengembangan angkutan massal.

Berdasarkan pemberlakuan PMDN 90 tahun 2019 menyebabkan adanya perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, perubahan dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan PMDN No. 90 Tahun 2019

Uraian	Sebelum			Sesudah		
	Tolok ukur	Indikator	Rumus	Tolok ukur	Indikator	Rumus
Tujuan						
SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah Panjang Jalan yang Terlayani Angkutan Umum/Panjang Jalan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah Panjang Jalan yang Terlayani Angkutan Umum/Panjang Jalan
Sasaran						
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANG SELAMAT, TERTIB, LANCAR	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	v/c ratio	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas (V/C rasio)	v/c ratio
TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG TERINTEGRASI DAN TERJANGKAU	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Darat	Persentase layanan angkutan darat	Jumlah Realisasi AU / Target AU	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Darat	Persentase layanan angkutan darat	Jumlah Realisasi AU / Target AU

Perumusan tujuan, sasaran dan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Visi :

Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan berekeadaban

Misi :

Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan :

Sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi

Sasaran :

1. Terwujudnya pembangunan dan pengembangan transportasi yang selamat, tertib dan lancar;
2. Terwujudnya pelayanan transportasi yang terintegrasi dan terjangkau.

Strategi :

1. Pemasangan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan untuk penanganan kemacetan secara intens;
2. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan untuk penanganan kemacetan secara intens;
3. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan angkutan umum untuk penumpang dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai;
4. Peningkatan kinerja pelayanan jalan;

Pengembangan sarana angkutan umum massal yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan

3.3 Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan

Berdasarkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2021 sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan dan PMDN No. 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan PMDN No. 90 Tahun 2019

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				PROGRAM			
Program manajemen dan rekayasa lalu lintas	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan	kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan	Jumlah target terpasang Tahun N/Jumlah Rambu Realisasi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Meningkatnya Layanan Angkutan Darat	Layanan Angkutan Darat	Realisasi AU/Target AU
Program peningkatan keselamatan llaj	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	Persentase Uji KBWU Kab.Bogor	Jumlah KBWU yang di uji tanun N/jumlah KBWU	Program pengelolaan perkeretaapian	Tersedianya kelayakan jalur kereta api	rekomendasi kelayakan jalur kereta api	Jalur KA
Program program pengendalian dan ketertiban lalu lintas	Meningkatnya Kinerja LLAJ	Kinerja LLAJ	V/C Ratio	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				PROGRAM			
Program pengelolaan fasilitas perlengkapan jalan	Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jenis Fasilitas yang terpelihara				
Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatnya layanan angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat	Realisasi AU/Target AU				
Program pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah					
KEGIATAN				KEGIATAN			
Kajian Manajemen dan Rekayasa lalu lintas pada simpang	Tersedianya Kajian Penanganan Kemacetan Simpang	Kajian Penanganan Kemacetan Simpang		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Pedoman Rencana Induk Jaringan LLAJ	Rencana Induk	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				KEGIATAN			
Survei Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)	Tersedianya Data Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)	Data Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan	Ketersediaan Fasilitas	
Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Daerah	Terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja Penyelenggaraan Transportasi Daerah	Kegiatan penilaian kinerja Penyelenggaraan Transportasi Daerah		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya operasional terminal	Operasional Terminal	
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)	Terpeliharanya Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS) yang terpelihara	Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS) yang terpelihara		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor	Pengujian Kendaraan	
Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tersedianya Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpasang	Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpasang		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tingkat Kinerja ruas jalan	Kinerja ruas jalan	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				KEGIATAN			
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Terpasangnya Rambu-rambu lalu lintas	Rambu-rambu lalu lintas		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum jasa angkutan orang dan barang	angkutan	
Pengadaan Lampu Lalu Lintas	Terpasangnya Lampu pengatur lalu lintas	Lampu pengatur lalu lintas		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya RUJ trayek pedesaan	RUJ trayek	
Pengadaan Pagar Pengaman (guardrail)	Tersedianya pagar pengaman jalan	pengaman jalan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya izin penyelenggaraan angkutan	Izin Angkutan	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				KEGIATAN			
Pengadaan Fasilitas Zona Selamat Sekolah	Tersedianya Fasilitas ZOSS	Fasilitas ZOSS		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	tersedianya rencana induk perkeretaapian	rencana induk perkeretaapian	
Pembangunan Alat Penerangan Jalan	Tersedianya alat penerangan jalan	penerangan jalan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja	Renstra dan Renja	
Pengadaan Patok Pengaman (deliniator)	Tersedianya kebutuhan Patok Pengaman (Deliniator)	kebutuhan Patok Pengaman (Deliniator)		Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	
Pengadaan Cermin Lalu Lintas	Tersedianya/terpasangnya cermin lalu lintas	cermin lalu lintas		Administrasi Umum	Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai	Kebutuhan Pegawai	
Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya/terpasangnya marka jalan	marka jalan		SUB KEGIATAN			
Pengadaan Road Barrier	Tersedianya road barrier	road barrier		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk	Rencana Induk	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pengadaan Paku Jalan	Tersedianya Paku Jalan	Paku Jalan		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan	
Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah I	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah I	kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah I		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan Jalan	
Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah II	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah II	kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah II		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah III	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah III	kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah III		Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah IV	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah iV	kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah iV		Pembangunan Gedung Terminal	Terlaksananya Pembangunan Gedung Terminal	Pembangunan Gedung Terminal	
Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah V	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah V	kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah V		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	
Pengelolaan UPT Wilayah I	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah I	pengelolaan UPT Wilayah I		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Pemeliharaan Terminal	
Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah II	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah II	pengelolaan UPT Wilayah II		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Uji	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah III	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah III	pengelolaan UPT Wilayah III		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji	
Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah IV	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah IV	pengelolaan UPT Wilayah IV		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Sarana Prasarana	
Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah V	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah V	pengelolaan UPT Wilayah V					
Pengawasan Retribusi UPT I	Terlaksananya Pengawasan Retribusi	Pengawasan Retribusi		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pengawasan Retribusi UPT II	Terlaksananya Pengawasan Retribusi	Pengawasan Retribusi		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	
Pengawasan Retribusi UPT III	Terlaksananya Pengawasan Retribusi	Pengawasan Retribusi		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	
Pengawasan Retribusi UPT IV	Terlaksananya Pengawasan Retribusi	Pengawasan Retribusi		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pengawasan Retribusi UPT V	Terlaksananya Pengawasan Retribusi	Pengawasan Retribusi		Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Terlaksananya uji kelayakan sarana transportasi/ Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	Uji kelayakan sarana transportasi/ Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)		Penyusunan Rencana Induk Perekereetaapian	Terlaksananya Rencana Induk Perekereetaapian	Rencana Induk Perekereetaapian	
pengadaan peralatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	peralatan pengujian kendaraan bermotor		Kajian Penanganan Perlintasan Sebidang kereta api	Terlaksananya Penanganan Perlintasan Sebidang kereta api	Perlintasan Sebidang kereta api	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM		PROGRAM		SUB KEGIATAN			
pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya peralatan pengujian kendaraan bermotor	peralatan pengujian kendaraan bermotor		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja	Renstra dan Renja	
pengadaan bukti tanda lulus uji	Tersedianya bukti tanda lulus uji	bukti tanda lulus uji		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
Pembebasan lahan gedung uji wilayah barat dan timur	Tersedianya lahan gedung uji wilayah barat dan timur	lahan gedung uji wilayah barat dan timur		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
Penyusunan DED Gedung Uji wilayah Barat	tersedianya DED Gedung uji	DED Gedung uji		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Feasibility Study (Studi Kelayakan) Pembangunan Taman Edukatif Keselamatan Transportasi	tersedianya FS taman edukatif keselamatan	FS taman edukatif keselamatan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk usia dini	Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk usia dini	Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk usia dini		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	
Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk pelajar	Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk pelajar	Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas angkutan untuk pelajar					
Pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas Tingkat Kabupaten Bogor	pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas Tingkat Kabupaten Bogor		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik awak kendaraan angkutan umum teladan	Terlaksananya pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Bahan Pelaksanaa n Verifikasi	
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Tersedianya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
Pengawasan Lalu Lintas Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Terlaksananya Pengawasan Lalu Lintas Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Pengawasan Lalu Lintas Pejabat Negara dan Pejabat Daerah		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
Penanggulangan Demo Angkutan Umum	Terlaksananya Penanggulangan Demo Angkutan Umum	Penanggulangan Demo Angkutan Umum		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Bogor	Terlaksananya Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Bogor	Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Bogor		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	
Pelaksanaan Car Free Day dan Car Free Night	Terlaksananya Car Free Day dan Car Free Night	Car Free Day dan Car Free Night		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
Pelaksanaan Ramp Check	terlaksananya keiatan Ramp Check di Wilayah puncak Kabupaten Bogor	keiatan Ramp Check di Wilayah puncak Kabupaten Bogor					
Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggar Angkutan Orang dan Barang	terlaksananya kegiatan Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggar Angkutan Orang dan Barang	kegiatan Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggar Angkutan Orang dan Barang		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (pendukung administrasi perkantoran, pengelola administrasi kepegawaian)	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pengawasan dan Pengendalian Sarana Fasilitas Lalu Lintas	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sarana Fasilitas Lalu Lintas	Jumlah kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sarana Fasilitas Lalu Lintas		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Pengawasan dan Pengendalian Prasarana fasilitas Lalu Lintas	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Prasarana fasilitas Lalu Lintas	Pengawasan dan Pengendalian Prasarana fasilitas Lalu Lintas		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Survei Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan	Terselenggaranya survei kinerja lalu lintas ruas jalan	survei kinerja lalu lintas ruas jalan		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	
Kajian Penanganan Perlintasan Sebidang kereta api	Terselenggaranya survei Kinerja Lalu Lintas Angkutan Lebaran	survei Kinerja Lalu Lintas Angkutan Lebaran		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang	tersedianya data pelayanan angkutan penumpang	data pelayanan angkutan penumpang		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
Rerouting Angkutan Umum (Angkot)	tersedianya rencana rerouting	rencana rerouting		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan	
Pengadaan Shuttle Bus	tersedianya shuttle bus	shuttle bus		Penyediaan Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor	Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor	
Pelayanan Perijinan Angkutan Umum	Terlaksananya Ijin Trayek Layanan Cepat, Tepat dan Murah Yang Diterbitkan	Jumlah Ijin Trayek Layanan Cepat, Tepat dan Murah Yang Diterbitkan		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
Penyusunan Renca Teknis Pangkalan/terminal	tersedianya rencana teknis pangkalan/terminal 1	rencana teknis pangkalan/terminal		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Penyusunan Feasibility Study Terminal/Pangkalan	tersedianya FS terminal/pangkalan	FS terminal/pangkalan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	
Penyelenggaraan Shuttle Bus, Bis Sekolah, Bis Difabel	terselenggaranya operasional Shuttle Bus, Bis Sekolah, Bis Difabel yang dioperasikan	operasional Shuttle Bus, Bis Sekolah, Bis Difabel yang dioperasikan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Pengadaan lahan untuk Pembangunan Perluasan Terminal / Sub Terminal /Pangkalan	Tersedianya Pengadaan lahan untuk Pembangunan Perluasan Terminal / Sub Terminal /Pangkalan	Pengadaan lahan untuk Pembangunan Perluasan Terminal / Sub Terminal /Pangkalan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyusunan Perencanaan Teknis Gedung Park and Ride	tersedianya rencana teknis gedung park and ride	rencana teknis gedung park and ride		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	
Pembangunan Halte Angkutan Umum	tersedianya halte angkutan umum	halte angkutan umum		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	terselenggaranya pengelolaan terminal angkutan umum	pengelolaan terminal angkutan umum		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman	
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan	Mobil Jabatan	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman untuk memfasilitasi Kegiatan	Makanan Dan Minuman untuk memfasilitasi Kegiatan		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	
Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Publikasi Kinerja	Publikasi Kinerja		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Aset	Pengelolaan Aset		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	
Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan dokumen dan arsip	pengelolaan dokumen dan arsip		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Mebeleur	
Pengelolaan Keamanan Kantor	Terlaksananya pengelolaan kemana kantor	pengelolaan kemana kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	
Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	kebersihan kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Terlaksananya pengelolaan legalitas kendaraan dinas/operasional/jabatan	pengelolaan legalitas kendaraan dinas/operasional/jabatan		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tepenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Perlengkapan Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi		Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	
Pembayaran Rekening Listrik PJU	Tersedianya Listrik PJU	Listrik PJU		Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Terselenggaranya pembinaan jasmani dan rohani aparatur	pembinaan jasmani dan rohani aparatur		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	Mesin/Kartu Absensi	
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian	pengelolaan administrasi kepegawaian		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	meningkatnya kapasitas dan komepetensi aparatur	kapasitas dan komepetensi aparatur		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian Kerja Lapangan	
Penyusunan Pelaporan Keuangan	tersedianya pelaporan keuangan	pelaporan keuangan		Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya Pakaian Korpri	Pakaian Korpri	
Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah	penatausahaan keuangan perangkat daerah		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari-hari	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisara Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya laporan dan ikhtisara realisasi kinerja perangkat daerah	laporan dan ikhtisara realisasi kinerja perangkat daerah		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
Penyusunan Perencanaan Anggaran	Tersedianya perencanaan anggaran	perencanaan anggaran		Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedainya perencanaan perangkat daerah	perencanaan perangkat daerah		Pemindahan Tugas PNS	Terlaksananya Pemindahan Tugas PNS	Pemindahan Tugas PNS	

URAIAN	SEBELUM			URAIAN	SESUDAH		
	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS		TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS
PROGRAM				SUB KEGIATAN			
SUB KEGIATAN				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

3.4 Dukungan Terhadap Pencapaian Target Pancakarsa

Tabel 3.3

Dukungan Terhadap Pencapaian Target Pancakarsa Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 untuk Tahun 2021

NO	KARSA BOGOR	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	
				Volume	Satuan
	MEMBANGUN				
1	Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Terintergrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1	Dokumen

Tabel 3.4

Dukungan Terhadap Pencapaian Target Pancakarsa

NO	KARSA BOGOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	
	MEMBANGUN					
1	Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Terintergrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	1	Dokumen

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					92,562,805,000				106,907,638,000
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					800,000,000				900,000,000
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	terlaksananya sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk pelajar	pelajar	3000	800,000,000	kab, Bogor, sukaraja cimandala	APBD	3000	900,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
			terlaksananya sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk usia dini	guru	30			APBD	30	
			terselenggaranya pemilihan dan pemberian penghargaan sopir angkutan umum teladan	kegiatan	1			APBD	1	
			terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	kegiatan	1			APBD	1	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					67,122,280,000				74,432,638,000
		Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	tersedianya halte angkutan	halte	6	560,800,000	kab, Bogor, cibinong cimandala	APBD	6	1,200,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Road Barrier	buah	250	66,561,480,000	kab, Bogor, sukaraja cimandala	APBD	250	73,232,638,000
			Terbayarnya Rekening Listrik	bulan	12				12	
			Tersediaanya Rambu-Rambu Lalu Lintas	buah	430				430	
			Tersedianya Alat Penerangan Jalan	paket	1				1	
			Tersedianya Cermin Lalu Lintas	buah	37				37	
			Tersedianya Lampu Lalu Lintas	unit	8				8	
			Tersedianya Marka Jalan	m2	3500				3500	
			Tersedianya Pagar Pengaman	meter	595				595	
			Tersedianya Paku Jalan	buah	1100				1100	
			Tersedianya Patok Pengaman	buah	430				430	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir					100,000,000				150,000,000
		Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	tersedianya pelayanan perizinan parkir	dokumen	4	50,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD	4	75,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	terselenggaranya pengawasan parkir	kegiatan	4	50,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD	4	75,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					120,000,000				225,000,000
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	tersedianya dokumen andalalin	dokumen	10	40,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD	10	75,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	teselenggarannya penilaian andalalin	kegiatan	10	40,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD	10	75,000,000
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	teselenggarannya pengawasan andalalin	kegiatan	10	40,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD	10	75,000,000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					535,000,000				3,575,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	tersedia rencana pembangunan terminal (FS)	titik	2	100,000,000	kab, Bogor, sukaraja cimandala	APBD	2	250,000,000
		Pembangunan Gedung Terminal	terbangunannya gedung terminal	terminal	1	5,000,000	kab, Bogor, bojong gede.	APBD	1	2,500,000,000
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	penyusunan rencana pembangunan park and ride	dokumen	1	5,000,000	kab, Bogor, sukaraja cimandala	APBD	1	200,000,000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	terpeliharanya terminal	terminal	2	375,000,000	Kab. Bogor, Cibinong, Semua Kelurahan	APBD	2	500,000,000
	Kab. Bogor, Bojong Gede, Semua Kelurahan									
	Kab. Bogor, Dramaga, Semua Kelurahan									

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C	Terlaksananya Pengelolaan Pangkalan	pangkalan	20	50,000,000	Kab. Bogor, Cibinong, Semua Kelurahan	APBD	20	125,000,000
			Terlaksananya Pengelolaan Terminal	terminal	5		Kab. Bogor, Citeureup, Semua Kelurahan		5	
							Kab. Bogor, Jonggol, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cileungsi, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cariu, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Parung, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Bojong Gede, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Leuwiliang, Semua Kelurahan			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
							Kab. Bogor, Ciampea, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cibungbulang, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Jasinga, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Parung Panjang, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Ciawi, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cisarua, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cijeruk, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Ciomas, Semua Kelurahan			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
							Kab. Bogor, Dramaga, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Ranca Bungur, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cigombong, Semua Kelurahan			
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					800,000,000				900,000,000
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	terlaksananya sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk pelajar	pelajar	3000	800,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	3000	900,000,000
			terlaksananya sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk usia dini	guru	30				30	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
			terselenggaranya pemilihan dan pemberian penghargaan sopir angkutan umum teladan	kegiatan	1				1	
			terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	kegiatan	1				1	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					3,190,000,000				4,125,000,000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersediaanya Peralatan pengujian Kendaraan Bermotor	alat	3	1,354,600,000	Tersediaanya Peralatan pengujian Kendaraan Bermotor	APBD	3	1,750,000,000
			Tersediaanya FS Gedung Uji	titik	2		Tersediaanya FS Gedung Uji		2	
			Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor	kendaraan	45000		Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor		45000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	tersedianya bukti tanda lulus uji kendaraan bermotor	kendaraan	45000	1,125,000,000	tersedianya bukti tanda lulus uji kendaraan bermotor	APBD	45000	1,125,000,000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	dokumen	1	363,400,000	tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	APBD	1	750,000,000
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan bermotor	jumlah kendaraan wajib uji	kendaraan	45000	347,000,000	jumlah kendaraan wajib uji	APBD	45000	500,000,000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					12,412,000,000				13,300,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Penilaian Transportasi Daerah	dokumen	1	1,005,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	1,300,000,000
			terpeliharanya ITS	kegiatan	1				1	
			Tersedianya Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	dokumen	1				1	
			Tersedianya Sistem Kontrol Lalu Lintas	dokumen	1				1	
			Terselenggaranya Survey Kebutuhan ITS	dokumen	1				1	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Pelaksanaan Car Free Day dan Car Free Night	kegiatan	96	11,407,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	96	12,000,000,000
			Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Bogor	lokasi	3				3	
			Pelaksanaan Ramp Check	kegiatan	96				96	
			Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggar Angkutan Orang dan Barang	kegiatan	48				48	
			Penanggulangan Demo Angkutan Umum	kegiatan	3				3	
			Penanggulangan Demo Angkutan Umum	kegiatan	6				6	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
			Pengawalan Lalu Lintas Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	pejabat	4				4	
			Pengawasan dan Pengendalian Prasarana fasilitas Lalu Lintas	kecamatan	40				40	
			Pengawasan dan Pengendalian Sarana Fasilitas Lalu Lintas	kegiatan	4				4	
			Survei Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan	ruas	225				225	
			Terselenggaranya angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	titik	10				10	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					150,000,000				200,000,000
		*Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya jasa angkutan	kegiatan	2	150,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	2	200,000,000
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					20,750,000				350,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	terseleenggaranya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan	kegiatan	1	20,750,000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD	1	350,000,000
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					425,000,000				-
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terseleenggaranya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan	kegiatan	1	425,000,000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD	1	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					250,000,000				300,000,000
		Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	terselenggaranya pemenuhan izin angkutan	ijin	3604	250,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	3604	300,000,000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					7,287,775,000				9,200,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	terlaksananya pengelolaan wilayah UPT I	kegiatan	1	1,593,375,000	Kab. Bogor, Cibinong, Semua Kelurahan	APBD	1	2,200,000,000
			terlaksananya terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	kegiatan	1		Kab. Bogor, Sukaraja, Semua Kelurahan		1	
			terselenggaranya pengawasan retribusi	kegiatan	1		Kab. Bogor, Babakan Madang, Semua Kelurahan		1	
							Kab. Bogor, Kemang, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Bojong Gede, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Tajurhalang, Semua Kelurahan			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	terelenggaranya pengelolaan wilayah UPT II	kegiatan	1	1,357,675,000	Kab. Bogor, Gunung Putri, Semua Kelurahan	APBD	1	1,800,000,000
			terlaksananya pengawasan retribusi	kegiatan	1		Kab. Bogor, Citeureup, Semua Kelurahan		1	
			terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan jalan	kegiatan	1		Kab. Bogor, Jonggol, Semua Kelurahan		1	
							Kab. Bogor, Cileungsi, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cariu, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Sukamakmur, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Klapanunggal, Semua Kelurahan			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
							Kab. Bogor, Tanjungsari, Semua Kelurahan			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	terlaksananya pengelolaan wilayah UPT III	kegiatan	1	1,442,675,000	Kab. Bogor, Ciawi, Semua Kelurahan	APBD	1	1,700,000,000
			terlaksananya terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	kegiatan	1		Kab. Bogor, Cisarua, Semua Kelurahan		1	
			terselenggaranya pengawasan retribusi	kegiatan	1		Kab. Bogor, Megamendung, Semua Kelurahan		1	
							Kab. Bogor, Caringin, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cijeruk, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Ciomas, Semua Kelurahan			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
							Kab. Bogor, Dramaga, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Tamansari, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cigombong, Semua Kelurahan			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	terlaksananya pengelolaan wilayah UPT IV	kegiatan	1	1,453,275,000	Kab. Bogor, Parung, Semua Kelurahan	APBD	1	1,700,000,000
			terlaksananya terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	kegiatan	1		Kab. Bogor, Gunung Sindur, Semua Kelurahan		1	
			terselenggaranya pengawasan retribusi	kegiatan	1		Kab. Bogor, Leuwiliang, Semua Kelurahan		1	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Kab. Bogor, Ciampea, Semua Kelurahan	APBD		
							Kab. Bogor, Cibungbulang, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Pamijahan, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Ciseeng, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Ranca Bungur, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Tenjolaya, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Rumpin, Semua Kelurahan			
			terlaksananya pengelolaan wilayah UPT V	kegiatan	1	1,440,775,000	Kab. Bogor, Rumpin, Semua Kelurahan		1	1,800,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
			terlaksananya terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	kegiatan	1		Kab. Bogor, Jasinga, Semua Kelurahan		1	
			terselenggaranya pengawasan retribusi	kegiatan	1		Kab. Bogor, Parung Panjang, Semua Kelurahan		1	
							Kab. Bogor, Nanggung, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Cigudeg, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Tenjo, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Sukajaya, Semua Kelurahan			
							Kab. Bogor, Leuwisadeng, Semua Kelurahan			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					250,000,000				300,000,000
	penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota									
		Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersediaanya Kajian Penanganan Perlintasan Sebidang kereta api	dokumen	1	250,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	300,000,000
			Tersediaanya Rencana Induk Perkereta Apian	dokumen	1				1	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					41,909,942,000				47,192,936,700
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					700,000,000				900,000,000
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	dokumen renstra dan renja	dokumen	2	170,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	2	200,000,000
		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	dokumen penyusunan program dan kegiatan	dokumen	1	150,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	175,000,000
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	dokumen	3	80,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	3	125,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	200,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	2	250,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah perangkat daerah	dokumen	2	100,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	2	150,000,000
								APBD		
	Administrasi Keuangan					36,665,397,000		APBD		40,517,936,700
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	36,200,397,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	14	39,820,436,700
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	1	150,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	165,000,000
		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	tersedianya dokumen verifikasi	dokumen	1	75,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	82,500,000
		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	tersedianya dokumentasi akuntansi dan pelaporan	dokumen	2	40,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	2	75,000,000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	tersedianya dokumen tanggapan pemeriksaan	dokumen	1	40,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	75,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya dokumen capaian kinerja dan realisasi	dokumen	2	40,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	2	75,000,000
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan	dokumen	1	40,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	75,000,000
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	tersedianya dokumen prognosis realisasi anggaran	dokumen	1	40,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	75,000,000
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	ketersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	40,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	75,000,000
	Administrasi Umum					4,432,545,000				5,625,000,000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya pengelolaan administrasi kepegawaian tersedianya pendukung administrasi perkantoran	dokumen	1	528,320,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	550,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	12	554,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	12	600,000,000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tepenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor	jenis	2	75,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	2	100,000,000
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen	1	150,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	175,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengelolaan legalitas kendaraan dinas/operasional/jabatan	dokumen	136	120,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	136	150,000,000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan	dokumen	3	50,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	3	75,000,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan	dokumen	1	1,030,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1	1,150,000,000
			tersedianya jasa keamanan	orang	15				15	
			tersedianya jasa kebersihan	orang	28				28	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	jenis	70	200,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	70	250,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Barang Cetak dan Penggandaan	cetak kertas & spanduk	100	125,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	100	200,000,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik,	jenis	14	50,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	14	100,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	jenis	8	50,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	8	100,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	40,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	12	75,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	jenis	3	12,500,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	3	25,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman untuk memfasilitasi Kegiatan	porsi	8500	175,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	8500	300,000,000
		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	hk	1135	200,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	1135	350,000,000
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	jenis	4	100,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	4	150,000,000
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jenis	5	30,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	5	75,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	lokasi	4	163,925,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	4	250,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	kendaraan	65	603,800,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	65	650,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	jenis	4	100,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	4	150,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/BerkTerlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantorla Peralatan Kantor	3 jenis	3	75,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	3	150,000,000
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					112,000,000				150,000,000
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	jenis	3	112,000,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	3	150,000,000

BAB V

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait dalam proses penyusunan maupun pemanfaatannya.

Sebagai tindak lanjut pasca penetapan, dokumen Renja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2021 wajib dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR



ADE YANA MULYANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196307041993121001